



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Potensi Tanah Sultan dalam Pembangunan Pertanian di Pesisir Yogyakarta guna Menekan Dampak Industrialisasi

Penulis

Ikhsan Adi Pratama¹, Fikri Danang Himawan², Dara Intan Salassa³, Nurul Hidayah⁴, Calistya Tresnaning Tyas⁵,

¹ Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

² Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

³ Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

⁴ Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada

⁵ Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

Potensi Tanah Sultan dalam Pembangunan Pertanian di Pesisir Yogyakarta guna Menekan Dampak Industrialisasi

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Isu Pembangunan infrastruktur skala besar, seperti bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA), telah mereduksi luas lahan sawah secara signifikan, sehingga mengancam eksistensi sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja perdesaan.
- 2) Pemanfaatan lahan pasir pesisir yang berstatus *Sultan Ground* merupakan alternatif vital untuk menyediakan lapangan kerja baru di sektor hortikultura dan pariwisata bagi warga yang tidak memiliki lahan milik.
- 3) Adanya praktik jual-beli ilegal dan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan Kekancingan tanah Kasultanan menciptakan kerentanan sosial dan ekonomi bagi petani pesisir.
- 4) Petani di lahan pasir memerlukan pendekatan penyuluhan dan teknologi spesifik agar mampu bersaing dengan pertanian konvensional serta menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif.

Diterima: 13 Feb 2026
Direvisi: 12 Mei 2026
Disetujui: 29 Mei 2026
Publikasi: 08 Juni 2026

Sitasi:

Pratama Al., Himawan DF., Salassa DI., Hidayah N., Tyas TC. 2026. Potensi Tanah Sultan dalam Pembangunan Pertanian di Pesisir Yogyakarta guna Menekan Dampak Industrialisasi. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(2), 1621-1626.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB
University.

Ringkasan

Policy brief ini membahas tantangan pembangunan agromaritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akibat arus industrialisasi dan konversi lahan pertanian yang berdampak terhadap kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani lokal. Konversi lahan yang terjadi secara masif, disertai dengan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, telah menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat perdesaan. Di sisi lain, DIY memiliki potensi strategis melalui pemanfaatan lahan pesisir dan Tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) yang dapat dikembangkan untuk mendukung hortikultura lahan pasir, pariwisata bahari, serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis sumber daya lokal. *Policy brief* ini menekankan pentingnya strategi pembangunan agromaritim yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan melalui transformasi penyuluhan pertanian spesifik lahan pasir, penguatan kepastian hukum administrasi pertanahan, perlindungan zona hijau dari ekspansi industri, serta penerapan filosofi “Among Tani Dagang Layar” sebagai arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di DIY.

Kata kunci: pembangunan pertanian, tanah sultan, wilayah pesisir, industrialisasi pertanian

Pendahuluan

Provinsi DIY selain dikenal sebagai kota pelajar ataupun kota wisata, ternyata memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan. Pemerintah Provinsi DIY bahkan telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan filosofi pembangunan DIY, yaitu; “Hamemayu Hayuning Bawana” (Sulistiyani *et al.*, 2020), sebagai cita-cita leluhur untuk menciptakan tata nilai kehidupan dan bermasyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai-nilai budaya (Yardan *et al.*, 2024; Triono 2025). Berdasarkan filosofi tersebut, pembangunan pertanian di Yogyakarta diartikan sebagai terciptanya “among tani dagang layar”, yaitu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan dari daratan beralih ke maritim, yang menjadikan pembangunan menghadap ke selatan, yang artinya pembangunan difokuskan ke daerah pesisir (Partosuwiryo, 2022; Pradana, 2021).

Pembangunan tersebut erat kaitannya dengan *Sultan Ground* (SG) atau biasa disebut Tanah Sultan yaitu lahan luas yang penggarapannya diserahkan kepada warga tanpa pungutan biaya sepeser pun. Secara keseluruhan, luas Tanah Kasultanan mencapai sekitar 1.000 hektare (Hasim, 2016). Hasil yang didapat para petani dari tanah kasultanan dapat mencapai belasan juta rupiah sekali panen. Fakta menariknya adalah tak serupiah pun pihak Keraton menarik biaya sewa. Lahan kasultanan itulah kini yang menjadi sumber penghidupan ribuan warga Yogyakarta. Kawasan pesisir pantai Samas di Bantul salah satunya. Areal pantai ini merupakan lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan bagi petani di pesisir selatan Yogyakarta (Widyaputra & Setyaningrum, 2024).

Penekanan dalam konsep “among tani dagang layar” yaitu menggunakan penjaminan kelestarian sektor pertanian. Dengan melestarikan lahan pertanian yang tersisa saat ini, akan terjadi ekspansi dan diversifikasi lapangan kerja. Selain itu, penambahan nilai ekonomi terhadap sektor pertanian dan perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah dari komoditas berbasis

pertanian dan perikanan yang dihasilkan (Saputra *et al.*, 2024). Adanya upaya tersebut menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terwujud dan mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DIY sampai saat ini masih berorientasi dan cenderung berfokus ke arah pengembangan sektor industri, sedangkan di satu sisi kurang mendukung sektor yang lain, khususnya sektor pertanian. Menurut Radianto (2020), gagasan industrialisasi dinilai sebagai pemikiran yang visioner (*great leap forward*) guna meningkatkan produktivitas secara efisien dan kemudian secara linier akan menciptakan “snowball effect” pada sektor perekonomian lain. Sayangnya pemikiran tersebut terkadang dijadikan tujuan utama, dan akhirnya lebih banyak keluar dari tujuan. Akibatnya, sektor pertanian justru semakin tertinggal dan terbelakang di dalam prioritas pembangunan.

Dari permasalahan di mana sektor pertanian di DIY terancam tertinggal karena dampak industrialisasi, adanya Tanah Kasultanan terhadap dunia industri diharapkan dapat menjadi alternatif dari berbagai permasalahan terkait pembangunan pertanian di DIY. Diharapkan tulisan ini dapat menggali lebih lanjut potensi sektor pertanian di DIY serta dampaknya pada keberlanjutan pembangunan pertanian.

Pembahasan

Alih Fungsi Lahan di Pesisir Yogyakarta

Ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang seiring dengan beralihnya lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian (Saputra & Lee, 2021). Sektor pertanian di Pulau Jawa menghadapi tantangan dari konversi lahan untuk industri atau permukiman. Oleh karena itu, tantangan pertanian di Pulau Jawa adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dalam menyikapi penyusutan lahan, meningkatkan daya saing produk, membangun citra pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani untuk mengimbangi pertumbuhan industri yang pesat dan mengancam kesejahteraan petani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penyediaan lahan untuk sektor pertanian. Upaya pemanfaatan lahan pasir pantai untuk tanaman hortikultura contohnya seperti di Provinsi DIY bagian selatan yang memiliki panjang ± 110 km dan berbatasan dengan garis pantai serta terdiri dari 4 wilayah pesisir seluas ± 8250 hektar, dan sekitar 3.408 hektar merupakan daratan berpasir dengan diameter ± 33 km. Daerah tersebut cukup aktif disebut sebagai Jalur Pansela (Pantai Selatan) dimana melewati tiga kabupaten yaitu Kulon Progo (Temon, Wates, Panjatan, Galur), Bantul (Sanden, Kretek), dan Gunungkidul (Saputro & Rahmawati, 2016).

Di sisi lain, banyak wilayah di DIY yang lahannya telah berubah secara signifikan atau terjadi alih fungsi lahan. Masyarakat pedesaan di DIY yang sebagian besar bekerja sebagai petani belum memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di sektor industri. Dampak dari hal tersebut, ketimpangan (*inequality*) antar kelas di masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin parah. Salah satu contoh dampak dari proses investasi di DIY yaitu adanya pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo atau lebih dikenal dengan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Pembangunan NYIA sendiri membutuhkan lahan seluas 645,63 hektar yang meliputi tujuh desa terdampak, ditambah terdapat sekitar 10 ribu hektar untuk lahan sawah, kemudian berkurang hanya menjadi 6.724 hektar akibat dari pembangunan bandara baru tersebut (Susanto, 2020).

Tanah Kesultanan dan Dampak bagi Ekonomi Masyarakat

Masalah lainnya, ternyata tidak banyak masyarakat di DIY yang memiliki aset lahan pertanian, sehingga banyak warga yang menjadi buruh tani. Hal tersebut menjadikan tingkat kemiskinan di DIY yang terparah di Pulau Jawa dan tingkat ketimpangannya tertinggi secara nasional (Frahita & Nurhayati, 2025). Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi DIY telah bekerja keras untuk merumuskan strategi-strategi jitu dalam menangani peliknya problematika di sektor pertanian. Salah

satunya melalui pemanfaatan Tanah Kesultanan yang dapat membantu perekonomian di wilayah pesisir, ditambah adanya konsep “among tani dagang layar” yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Masyarakat pesisir pantai selatan Yogyakarta, salah satu contohnya di daerah Pantai Samas, sekarang telah merasakan manfaat dengan adanya Tanah Sultan karena mereka melakukan kegiatan usahatani dan menikmati tanaman yang mereka rawat setiap hari dapat menopang kebutuhan ekonomi sehari-hari (Chairunnisa *et al.*, 2017). Di balik itu semua, ada proses yang panjang hingga akhirnya masyarakat dapat menikmati hasil tersebut. Menurut Ketua Kelompok Tani Lahan Pasir Manunggal Bapak Subandi dikutip dari *JogjaSuara.com* (2020) dan Salsabilla (2023), proses itu dimulai sejak 1998, saat lahan yang notabene adalah *Sultan Ground* seluas 1.000 hektar di pesisir pantai selatan, masih berbentuk padang pasir tak produktif. Semua itu berubah sejak adanya kedatangan beberapa pihak terkait, mulai dari UGM hingga BPTP Yogyakarta, yang akhirnya dapat bekerja sama untuk mengubah kondisi tersebut. Pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian memperkenalkan beberapa teknologi, di antaranya; pengelolaan lahan air, varietas, tata kelola pemupukan, dan kelembagaan, atau pembentukan kelompok tani. Kolaborasi parapihak tersebut berbuah manis dengan kemampuan lelang hasil panen yang hampir terjadi setiap hari. Artinya, petani dapat menjual komoditas yang bahkan tiap hari harganya berubah. Namun demikian, tanah sultan juga masih memiliki masalah terkait administrasi. Ketidakjelasan status administrasi penggarap di atas *Sultan Ground* (SG) menciptakan celah terjadinya praktik pungutan liar dan alih fungsi lahan ilegal. Tanpa adanya sistem pendaftaran penggarap yang transparan (digitalisasi data Kekancangan), lahan produktif di pesisir sangat rentan dikonversi menjadi kawasan industri atau bangunan permanen yang melanggar tata ruang zona hijau.

Rekomendasi

Dari pemaparan di atas, penulis melihat

bahwa setidaknya masyarakat memiliki tiga opsi untuk memanfaatkan wilayah di daerah pesisir Yogyakarta. Pertama, masyarakat mengelola lahan pesisir ini untuk bercocok tanam (secara kasar) seperti menanam bawang merah, cabai, buah naga, melon dan semangka sehingga walaupun marginnya kecil, namun memberikan kontribusi yang besar terhadap lingkungan. Kedua, masyarakat dapat mengelola lahan pesisir untuk tanaman non pertanian, khususnya pariwisata. Pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi mereka yang mengelola wilayah pesisir dengan baik dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah rekonsiliasi atau gabungan dari dua opsi di atas.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa tanah sultan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat daerah pesisir walaupun masih banyak polemik yang harus dihadapi dan diatasi bersama. Maka dari itu menurut penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY diantaranya:

1. Penyuluhan pertanian daerah pesisir

Penyuluhan pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian karena terkait erat dengan proses dan mekanisme untuk mentransfer keterampilan, informasi, dan inovasi pertanian kepada petani. Perluasan pengetahuan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menyeimbangkan dinamika dan percepatan pembangunan pertanian (Subejo *et al.*, 2017). Mengapa harus dilakukan penyuluhan? Alasannya adalah karena melihat petani di daerah pesisir yang melakukan budidaya pertanian di atas lahan pasir pantai, bukan di tanah pada umumnya. Di sini para petani harus lebih diperhatikan terkait SOP/GAP bercocok tanam di lahan pasir pantai sehingga diharapkan petani daerah pesisir dapat menghasilkan produksi yang menguntungkan serta mencegah timbulnya kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara petani lahan pasir pantai dan petani lahan biasa (konvensional).

2. Membantu mengelola dan mendukung

kebijakan terkait pariwisata daerah pesisir

Selain mendukung program pertanian daerah pesisir, Pemerintah Provinsi DIY harus memperhatikan bagaimana tata kelola pariwisata di daerah tersebut. Dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian daerah pesisir dari tiga sektor, yaitu; pariwisata, pertanian, dan perikanan.

3. Melakukan sosialisasi dan penindakan tegas terkait pelanggaran atau penyelewengan yang ada di tanah sultan

Pemerintah Provinsi DIY harus memberikan sosialisasi terkait apa itu Tanah Sultan, hukum yang ada, tata kelolanya, sejarah dan peraturan lainnya terkait Tanah Sultan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Mengingat terdapat oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dalam jual-beli atau sewa-menyewa tanah sultan perlu adanya sosialisasi dan penindakan tegas jika hal tersebut masih dilanggar.

Guna mencapai suksesnya pembangunan pertanian di daerah pesisir Yogyakarta sejatinya tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja namun harus didukung oleh banyak pihak baik dari masyarakat, pemerintah daerah, pihak kesultanan dan stakeholders terkait. Hal ini harus dilakukan secara sistematis dan terarah guna menekan adanya dampak pembangunan industri di Yogyakarta.

Kesimpulan

Kebijakan pembangunan saat ini di Provinsi DIY menunjukkan kontradiksi tajam antara visi filosofis "Among Tani Dagang Layar" dan kenyataan lapangan yang tampaknya cenderung mendukung industrialisasi masif. Pendekatan yang ada saat ini gagal dalam beberapa aspek krusial:

Pertama, kebijakan alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional seperti pembangunan Bandara NYIA dilakukan tanpa mengganti kehilangan lahan produktif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik masih lebih diprioritaskan yang berpeluang mengorbankan sektor pertanian. Karena berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, metode ini

gagal mempertahankan kedaulatan pangan dalam jangka panjang.

Kedua, sistem pengelolaan *Sultan Ground* masih menghadapi sistem yang kompleks dan lemahnya pengawasan. Dengan kebijakan saat ini, ada celah hukum di mana individu tertentu melakukan transaksi ilegal dengan tanah yang seharusnya dimiliki warga. Petani penggarap menjadi ragu karena ketidakjelasan administrasi pertanahan ini, yang pada akhirnya menghambat petani untuk melakukan investasi swadaya di lahan pasir. Panitikisma (Lembaga Pertanahan Keraton), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Provinsi DIY perlu melakukan audit lahan SG secara berkala dan mempercepat penerbitan surat izin (Kekancingan) bagi petani penggarap eksisting untuk memberikan kepastian hukum. Lembaga DPRD dan Bappeda Provinsi DIY juga dapat berperan dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengunci lahan pasir pesisir sebagai "Zona Pertanian Agromaritim Abadi" yang tidak boleh dialihfungsikan untuk industri manufaktur.

Ketiga, program penyuluhan dan pendampingan pertanian di daerah pesisir masih bersifat generik dan belum menyentuh spesifikasi teknis lahan pasir secara mendalam. Tanpa perubahan fokus dari sekadar pemberian bantuan bibit ke arah penguatan sistem pasar dan perlindungan lahan, keberlanjutan sektor pertanian pesisir akan terus terancam oleh ekspansi industri pariwisata dan infrastruktur yang tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan yang lebih tegas dalam menetapkan zona pertanian abadi pada lahan pesisir agar filosofi pembangunan maritim DIY tidak sekadar menjadi semboyan tanpa kedaulatan bagi petaninya.

Daftar Pustaka

Chairunnisa, I., Rijanta, R., & Hasanati, S. (2017). Operasionalisasi konsep Among Tani Dagang Layar untuk pembangunan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1).
<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/819/792>

Frahita, C., & Nurhayati, S. F. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2017–2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 1847–1860.

Hasim, R. (2016). Politik hukum pengaturan Sultan Ground dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan hukum tanah nasional. *Arena Hukum*, 9(2), 207–224.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>

Partosuwiryo, S. (2022). *Among Tani Dagang Layar*. Pandiva Buku.

Pradana, F. I. (2021). Local wisdom in Yogyakarta International Airport. *IJCAS*, 8, 71–88.

Radianto, H. S. H. (2020). *Pertanian dan industri: Prospek, strategi, dan kebijakan di masa depan*. Prenada Media.

Salsabilla, A. (2023). Eksistensi tanah Sultan Ground dalam hukum tanah nasional. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 21–30.

Saputra, E., Andriyono, S., & Isoni, W. (2024). Increasing the added value of fishery products to improve the economy of West Sulawesi coastal communities. *Jurnal Abdi Insani*, 11, 489–497.

Saputra, M. H., & Lee, H. S. (2021). Evaluation of climate change impacts on the potential distribution of *Styrax sumatrana* in North Sumatra, Indonesia. *Sustainability*, 13(2), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13020462>

Saputro, T. E., & Rahmawati, N. (2016). Agriculture center di lahan pasir Pantai Baru Yogyakarta: Dengan pendekatan green architecture. *Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 13.

- Sholekan, M. N. (2015). *Pengelolaan lahan pesisir untuk usaha pertanian dan pariwisata sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta.
- Subejo, Untari, D. W., Wati, R. I., & Mewasdinta, G. (2017). The emerging modern information system in agricultural development: A case study on ICT use for supporting agricultural activities in rural Yogyakarta Indonesia. *Information (Japan)*, 20(10), 7445–7461.
- Sulistiyani, A. T., Sutarno, Setyono, P., & Wahyunengseh, R. D. (2020). The local elites perception of “Hamemayu Hayuning Bawana” philosophies in the Green Village Program in Yogyakarta Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012099. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012099>
- Susanto, H. (2020). Analisis dampak sosial ekonomi dalam pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.820>
- Triono, T. A. (2025). Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal: Hamemayu Hayuning Bawana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 3.
- Widyaputra, P. K., & Setyaningrum, A. (2024). Pola pemanfaatan lahan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.576>
- Yardan, M. A., Buana, N. A. S., Meivan, W. R., & Hidayatullah, A. F. (2024). The concept of Memayu Hayuning Bawana as a Javanese spiritual lifestyle in protecting the environment. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2).



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Ikhsan Adi Pratama, merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Fokus pada penelitian berbasis keberlanjutan pertanian, ekonomi pertanian dan lingkungan. Saat ini fokus pada kajian terkait usahatani padi dan karbon. Aktif pada beberapa kegiatan akademik dan lingkungan guna menunjang riset dan keilmuan. **(Corresponding Author)**



Fikri Danang Himawan, merupakan mahasiswa Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Aktif melakukan riset dan penulisan ilmiah pada isu agroforestri, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta relasi hutan-masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ia produktif menulis opini populer dan terlibat dalam berbagai forum diskusi kebijakan kehutanan dan lingkungan.



Dara Intan Salassa, bekerja di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan saat ini aktif sebagai konsultan untuk UNDP Indonesia dalam program Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Komoditas Padi Berkelanjutan di Kab. Luwu, Sulawesi Selatan. Bidang kepakaran mencakup isu pertanian padi berkelanjutan, pengembangan rantai nilai dan pasar, serta kewirausahaan. Berpengalaman dalam publikasi laporan, jurnal, dan policy brief, yang mencakup topik pertanian.



Nurul Hidayah, merupakan lulusan sarjana Pendidikan Biologi UIN Bandung dan saat ini telah lulus mendapatkan gelar master dari Biologi UGM. Aktif dalam melakukan riset, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan biologi. Memiliki minat ekologi dan konservasi dan kepakaran diriset ekologi dan monitoring biodiversitas.



Calistya Tresnaning Tyas, merupakan mahasiswa sarjana program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Saat ini, ia menempuh pendidikan dengan fokus pada kegiatan akademik. Memiliki ketertarikan pada kajian agribisnis dan analisis sosial ekonomi pertanian dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan.



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680